

INDONESIA – AMERIKA DALAM KERANGKA *COMPRHENSIVE PARTNERSHIP*

Yerichielli

Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 112-116, Bandung, Kode Pos, Indonesia

E-Mail: Yeruiechielliii@gmail.com

Abstract

Indonesian political and strategic relations are quite good with the United States, especially since the New Order regime in Indonesia, namely in the 1960s. But economic ties the two sides have not grown enough in comparison with the United States economic relations with neighboring Indonesia, Singapore and Australia. In terms of political and strategic aspects in the relationship between the two countries produced in the United States and Indonesia are less developed the economic potential between the two.

Both countries have significant potential to further enhance the bilateral relations to the mutual interest through the establishment of a comprehensive partnership (Comprehensive Partnership) is a strategic step in improving relations of cooperation in politics, economy, security, environment, energy, education and other areas of life other.

Efforts to improve relations between the two sides appeared in recent years because of the encouragement of the government of Indonesia and US efforts to seek larger markets in order to restore its economic crisis. In November 2010 the leaders of both countries signed the US-Indonesia Compherensive Partnership Agreement (US-Indonesia CPA) which is a long-term commitment of both countries to enhance and deepen bilateral relations. One sector that is the focus of the cooperation is the economic sector.

Keywords: *Indonesia, United States, Economic Cooperation.*

Abstrak

Indonesia menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan Amerika Serikat terutama sejak rezim orde baru berkuasa di Indonesia yaitu sekitar tahun 1960an. Namun hubungan ekonomi kedua pihak tidak cukup berkembang dibandingkan dengan hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Australia. Di karenakan aspek politik dan strategis dalam hubungan kedua negara mengakibatkan Amerika Serikat dan Indonesia kurang mengembangkan potensi-potensi ekonomi diantara keduanya.

Kedua negara memiliki potensi yang signifikan untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral bagi kepentingan bersama melalui pembentukan kemitraan komprehensif (Comprehensive Partnership) yang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan hubungan kerjasama dibidang politik, ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, energi, pendidikan dan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Upaya peningkatan hubungan kedua belah pihak muncul dalam beberapa tahun terakhir karena dorongan dari pemerintah Indonesia dan upaya Amerika Serikat untuk mencari pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonominya. Pada bulan November 2010 pemimpin kedua negara menandatangani US-Indonesia *Compherensive Partnership Agreement* (US-Indonesia CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Salah satu sektor yang menjadi fokus kerja sama adalah sector ekonomi.

Kata Kunci: Indonesia, Amerika Serikat, Kerjasama Ekonomi

1. Pendahuluan

Indonesia telah memiliki hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Hubungan ini kita bisa lihat pada tahun 1949. Pada tahun tersebut Menteri Kemakmuran RI Dr. A.K. Gani berangkat dalam sebuah misi diplomatik ke Amerika Serikat untuk mengadakan kesepakatan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Perjalanan tersebut tidak saja merupakan salah satu tonggak bersejarah hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat saja, namun pada tahun tersebut juga merupakan tahun resminya Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Walaupun Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang resmi, namun pada perjalanannya hubungan dua negara tersebut telah lama disebut tidak selamanya berjalan mulus.

Seperti lazimnya dinamika hubungan, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat mengalami pasang surut. Salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan bagi bangsa Indonesia dalam berhubungan dengan Amerika Serikat terjadi ketika pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan mengembargo persenjataan militer Indonesia di era pemerintahan orde baru. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya akses Indonesia pada bidang militer. Walaupun hubungan politik Indonesia - Amerika Serikat mengalami penurunan ketika Amerika Serikat mengembargo persenjataan militer Indonesia, tetapi hubungan dagang antara Indonesia - Amerika Serikat terus mengalami peningkatan. Berbagai kerjasama terbentuk dalam dekade ini baik kerjasama bilateral yang dimana dalam hal tersebut hanya terlibat dua negara saja, dan kerjasama multilateral yang bisa kita ambil contohnya adalah negara

Indonesia dengan anggota ASEAN. Kerjasama bilateral inilah yang semakin diperkuat oleh Negara Indonesia dengan negara penyandang nama Super Power tersebut. Kita bisa lihat berbagai kerjasama yang telah kita bentuk baik dalam perekonomian, pertahanan, dan investasi. Hal ini dilakukan sudah pasti untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut. Dalam kancah internasional hubungan bilateral ini lebih kondusif sehingga pemantapan dalam proses ini sangat dibutuhkan sebelum diplomasi ini terjadi

(http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2013%5Ckajian%5Cpkrb%5C Kajian_Kerja_Sama_Bilateral_RI-AS.pdf Diakses 20/7/13).

Upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan perekonomian, perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kawasan Amerika merupakan sebuah kawasan yang potensial dan menjanjikan sebagai mitra Indonesia, karena didalamnya terdapat negara-negara yang sudah sangat maju perekonomiannya seperti Amerika Serikat yang merupakan pasar tradisional bagi produk ekspor Indonesia.

Sistem perekonomian Amerika Serikat adalah sistem pasar bebas dengan memberikan kebebasan bagi pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan (Kementerian Perdagangan, 2012). AS juga merupakan salah satu negara asal impor terhadap Indonesia, bersama dengan negara-negara ASEAN, Jepang, dan Cina. Nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat pada tahun 2011 mencakup 6,09% dari total impor Indonesia, lebih kecil dari nilai impor tahun 2009 dan 2010.

Hubungan ekonomi yang kurang berkembang saat ini cukup memprihatinkan mengingat kedua negara memiliki potensi yang besar dan peningkatan kegiatan ekonomi diantara kedua negara dapat memperkuat perekonomian kedua negara. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu kajian (study) dalam menganalisis peluang dan tantangan guna meningkatkan hubungan ekonomi dan finansial yang saling menguntungkan terutama bagi Indonesia dalam suatu bentuk kajian penelitian.

Faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian di Indonesia adalah harga, pembiayaan, keterampilan teknis, dan layanan purna jual. Perusahaan harus siap untuk menginvestasikan modal dan tenaga kerja untuk membuat tempat perwakilan di Indonesia. Perusahaan non-keuangan Indonesia memperoleh hamper 50% pembiayaannya dari luar negeri melalui pinjaman, obligasi, dan kredit lainnya sehingga ekspor Indonesia sering bergantung pada pembiayaan perdagangan.

Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya mesti mengambil lebih banyak langkah yang memudahkan perusahaan internasional membuka usaha di kawasan ini. Perusahaan Amerika Serikat mengharapkan pengurangan batasan soal perlengkapan di bidang farmasi dan layanan kesehatan, keluarnya izin impor yang lebih cepat, serta menurunnya tingkat korupsi di sejumlah negara di kawasan Indonesia. Persaingan untuk menarik investasi di tingkat dunia semakin ketat dan cara yang terbaik untuk memikat investasi adalah dengan menciptakan lingkungan usaha yang menarik (<http://export.gov/indonesia/doingbusinessinindonesia/index.asp> Diakses 15/05/2013).

Kedua negara memiliki potensi yang signifikan untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral bagi kepentingan

bersama melalui pembentukan kemitraan komprehensif (Comprehensive Partnership) yang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan hubungan kerjasama dibidang politik, ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, energi, pendidikan dan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Upaya peningkatan hubungan kedua belah pihak muncul dalam beberapa tahun terakhir karena dorongan dari pemerintah Indonesia dan upaya Amerika Serikat untuk mencari pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonominya. Pada bulan November 2010 pemimpin kedua negara menandatangani US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement (US-Indonesia CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Salah satu sektor yang menjadi fokus kerja sama adalah sector ekonomi.

Kemitraan untuk pertama kali diusulkan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada acara USINDO pada bulan November 2008. Dalam pidatonya Presiden SBY mengatakan bahwa kemitraan harus membawa hasil yang saling menguntungkan dan bersifat nyata bagi rakyat Indonesia. Karena kemitraan itu berjalan dalam jangka yang panjang, dan memiliki yang kekuatan *people to people*. Menteri Luar Negeri Clinton berkomitmen bahwa Amerika Serikat pada bulan Februari 2009 untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk mengejar suatu kemitraan dengan agenda yang konkret. Menteri Luar Negeri Indonesia Natalegawa mencatat bahwa Kemitraan harus mencakup berbagai sektor penting untuk pembangunan jangka panjang Indonesia dalam: pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan dan investasi, energi, keamanan, pangan,

keamanan, pemerintahan yang baik, lingkungan, dan kesehatan.

Kerjasama dalam bisnis dapat mempromosikan dua arah investasi asing, mendorong inovasi melalui pertukaran teknis dan kolaborasi, serta mendorong interaksi yang lebih besar antara bisnis di masyarakat, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Sebuah hubungan yang lebih kuat antara Amerika Serikat dan Indonesia harus mencakup komponen berkembangnya bisnis dan kerjasama investasi. Bagian ini berfokus pada strategi untuk memperdalam kerjasama dalam bisnis dan investasi bawah kemitraan komprehensif yang akan datang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Indonesia menawarkan daya tarik yang kuat untuk investasi, termasuk pasar domestik yang besar dengan kelas menengah lebih dari 20 juta yang merupakan sebuah rekor pertumbuhan yang solid selama dekade terakhir, demokrasi yang stabil sistem politik, kebijakan fiskal dan moneter yang bertanggung jawab, dan tenaga kerja yang besar dengan tingkat tinggi. Mendasari tingkat investasi Indonesia memiliki rata-rata 22-23% dari PDB, dengan efisiensi yang relatif tinggi.

Ada banyak kesempatan untuk bekerjasama pada pembangunan infrastruktur antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang akan meningkatkan peluang untuk bisnis dan investasi perusahaan domestik dan asing. Indonesia telah membuat pembangunan infrastruktur yang merupakan faktor utama, dan perusahaan-perusahaan AS yang mampu membawa modal, praktik terbaik, dan teknologi yang terbaik. Dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, perusahaan Indonesia akan menjadi lebih kompetitif di dalam negeri dan global, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat

akan lebih bersedia untuk berinvestasi di Indonesia yang juga akan memungkinkan AS untuk menyediakan barang yang lebih banyak dan memberikan layanan kepada konsumen Indonesia.

Selain itu perusahaan yang dimiliki Amerika Serikat mencatat manfaat besar dengan mengambil Indonesia sebagai mitra yang kuat di bidang infrastruktur pembangunan. Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur (keras, lunak, nirkabel, dan kesehatan, dll) memiliki potensi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Indonesia dan Amerika untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral.

Dalam rangka mendukung kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat, Pemerintah Amerika Serikat telah mengembangkan beberapa inisiatif seperti yang tertuang di Fact Sheet Economic and Trade Cooperation with Indonesia yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada tahun 2010 sebagai berikut:

- U.S. Exports and Investments in Indonesia

Amerika Serikat adalah pemasok utama alat transportasi pesawat terbang dan kereta api serta berbagai peralatan untuk mengembangkan sektor energi Indonesia. Nilai ekspor pertanian Amerika Serikat ke Indonesia yang sedang berjalan mencapai lebih dari 3 miliar dolar di tahun 2011, atau mengalami peningkatan sebesar 53 dibandingkan tahun lalu. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah menyatakan rencana mereka untuk membuka atau membuka kembali pabriknya di Indonesia dengan nilai investasi gabungan lebih dari 450 juta dolar.

- U.S. - Indonesia Trade and Investment Dialogue

Indonesia dan Amerika Serikat secara teratur terlibat dalam isu-isu perdagangan dan investasi melalui U.S.-Indonesia Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) untuk membicarakan masalah keterbatasan akses pasar di sektor-sektor utama, seperti obat-obatan, produk pertanian, dan energi.

□ Commercial Dialogue

Tanggal 11 November, Amerika Serikat dan Indonesia meluncurkan U.S.-Indonesia Commercial Dialogue dengan fokus pada pengembangan pasar dan fasilitas perdagangan serta meningkatkan hubungan komersial melalui kerjasama sektor swasta.

□ U.S. Trade Missions and Reverse Trade Missions

Pada bulan april 2011, Departemen Perdagangan AS mendatangkan misi pendidikan terbesar ke Indonesia dengan partisipasi 56 universitas Amerika Serikat. Departemen Pertanian Amerika Serikat memimpin misi dagang bersama 18 perusahaan agribisnis untuk bertemu dengan lebih dari 100 pelaku bisnis di Indonesia. Dengan sponsor dari U.S. Trade and Development Agency (USTDA) misi dagang dari Indonesia juga berkunjung ke Amerika Serikat, termasuk mengundang beberapa pejabat senior pemerintah Indonesia untuk mempelajari praktek terbaik dalam mengembangkan sektor panas bumi dan misi perdagangan balasan lainnya yang lebih meninjau keselamatan penerbangan dan manajemen lalu lintas udara di Indonesia.

□ Entrepreneurship Support

Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk mempromosikan kewirausahaan di Indonesia melalui

kompetisi rencana bisnis yang disponsori oleh Global Entrepreneurship Program (GEP), yang melibatkan 32 bisnis pemula di Indonesia, 11 pengusaha dan investor terkemuka dari AS. Komitmen tersebut juga ditunjukkan dalam bentuk dukungan terhadap KTT Kewirausahaan pertama di ASEAN pada bulan Juli lalu di mana Menlu Clinton memberikan sambutannya.

f. U.S. Support for Energy Investment in Indonesia

U.S.-Indonesia Energy Dialogue mendukung beberapa acara yang diselenggarakan selama tahun 2011 untuk mempromosikan pertumbuhan dan investasi di sektor energi di Indonesia, termasuk pelatihan dari USTDA dalam pengembangan tenaga listrik panas bumi di enam lokasi di Indonesia dengan fokus pada proses tender yang jelas dan transparan. Pada bulan Mei 2011, Departemen Energi Amerika Serikat menyelenggarakan U.S.-Indonesia Investment Energy Roundtable yang mempertemukan para pejabat senior dari kedua negara dengan sector swasta untuk membahas peluang dan peningkatan investasi di bidang energi.

g. OPIC Trade and Investment Conference

Lebih dari 300 peserta yang mewakili 22 negara dan lebih dari 100 perusahaan Amerika Serikat menghadiri konperensi investasi internasional yang diselenggarakan oleh Overseas Private Investment Corporation (OPIC) di Jakarta, Mei 2011. OPIC setuju untuk memberikan pembiayaan jangka panjang sebesar 21 Juta dolar untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas penggilingan padi modern di Jawa Timur

yang akan membantu lebih dari 50.000 keluarga petani propinsi ini.

h. U.S. Grant to PT Kereta Api Indonesia

Pada bulan september 2011, U.S. Trade and Development Agency (USTDA) memberikan hibah bantuan teknis senilai 593.000 dolar kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), operator kereta api milik negara, untuk mengembangkan rencana strategis dalam meningkatkan kapasitas sistem sinyal dan jaringan telekomunikasi (http://indonesia.usaid.gov/documents/document/Document/648/USIndonesia_Trade_and_Investment_Relationship Diakses 16/05/2013).

Berdasarkan latar belakang dan fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam laporan penelitian dengan judul : Kerjasama Investasi Indonesia – Amerika Serikat Pasca Perjanjian Comprehensive Partnership 2010.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa matakuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

- Pengantar Hubungan Internasional, merupakan peletak dasar bagi penelitian yang akan dilakukan, terkait hubungan para aktor yang melewati batas-batas negara.
- Kerjasama Internasional. Mata kuliah ini membantu untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mencapai sebuah hubungan kerjasama antara kedua atau lebih negara dalam mencapai sebuah kesepakatan.

- Ekonomi Politik Internasional. Mata kuliah ini akan membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena interaksi yang dinamis antara faktor-faktor ekonomi dan politik.
- Bisnis Internasional. Mata kuliah ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah negara dalam melakukan perdagangan antar negara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerjasama investasi Amerika Serikat – Indonesia sebelum Perjanjian Comprehensive Partnership dilaksanakan?
2. Program apa saja yang dilakukan Indonesia – Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama investasi dalam konteks Perjanjian Comprehensive Partnership di Indonesia?
3. Kendala yang dihadapi Amerika Serikat dalam implementasi Perjanjian Comprehensive Partnership di bidang investasi di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah, untuk mempelajari dan mengetahui hubungan kerjasama investasi antara Indonesia – Amerika Serikat dan dampaknya terhadap pembangunan perekonomian kedua negara tersebut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menggambarkan dan menganalisa hubungan /

kerjasama investasi Amerika Serikat – Indonesia pasca Perjanjian Comprehensive Partnership 2010.

- b) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kerjasama investasi antara Indonesia – Amerika
- c) Untuk mengetahui hasil-hasil kerjasama investasi yang telah dicapai
- d) Pasca Perjanjian Comprehensive Partnership.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teoriilmuhubungan internasional serta dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional.
2. Mengundang ketertarikan untuk meneliti kerjasama investasi suatu negara terhadap bisnis internasional.
3. Mengetahui hubungan antara kerjasama internasional dengan ilmu hubungan internasional.
4. Mendorong peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam kerjasama investasi yang berpedoman pada metode dan teknik yang sifatnya ilmiah sekaligus sebagai syarat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan

Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang unitary dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, Organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan studi Hubungan Internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGO dan INGO serta makin kuatnya peran negara-negara di luar Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kancah Hubungan Internasional.

Pada tahun 1980-an, pola Hubungan Internasional masih bersifat state centric (dalam arti masih bipolar), tetapi muncul kekuatan-kekuatan sub groups yang mengemukan.

Studi Hubungan Internasional adalah interaksi yang terjadi antara negara - negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa.

Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

Kemudian pada tahun 1990-an, runtuhnya Uni Soviet sebagai Negara komunis utama telah memunculkan corak perkembangan ilmu Hubungan

Internasional yang khas. Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini (Perwita dan Yani, 2005:2-5).

Hubungan yang biasanya dilakukan masyarakat ini biasanya dilakukan dalam pasar internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Guna memahami seberapa pentingnya ilmu Hubungan Internasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu Negara, mapadampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus menghadapinya sehingga isu-isu seperti pekerja anak ini menjadi suatu permasalahan serius bagi pemerintah Indonesia (Robert & Sorensen. 2005:5).

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu

keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Sebagai aktor terpenting di dalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama di dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005:128).

2.2 Kerjasama Internasional Kerjasama internasional merupakan

suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:34).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional;

4. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktoraktor ekonomi dan masyarakat sipil.
5. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – Negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006: 6).

Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional sebagai wadah kerjasama memainkan peran penting dengan kapasitasnya sebagai aktor non-negara Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat dan bergabung.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan Negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan

ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 2000: 362-363).

2.3 Perjanjian Internasional

Sebelum tahun 1969 hukum perjanjian internasional terdiri dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Kaidah-kaidah ini untuk sebagian besar telah dikondifikasikan dan disusun kembali dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties), yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 menyusul masuknya 35 ratifikasi atau aksesi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 84 Konvensi.

Sesuai dengan definisi yang dipakai dalam Pasal 2 Konvensi, sebuah Perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai : Suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan hubungan antara mereka yang diatur oleh hukum internasional. Memang istilah traktat dapat dianggap sebagai nama umum dalam hukum internasional dan dapat mencakup perjanjian antara organisasi-

organisasi internasional disatu pihak dan sebuah negara dipihak lain meskipun harus diingat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tidak berlaku terhadap instrumen lain tersebut, melainkan menunjuk pada perjanjian antara negara-negara yang dibuat dalam bentuk tertulis. Di lingkungan internasional, perjanjian itulah yang digunakan untuk hampir setiap jenis perbuatan hukum atau transaksi, mulai dari persetujuan yang sifatnya bilateral semata-mata antara negara-negara sampai suatu perjanjian yang paling pokok seperti instrumen konstitusi multilateral sebuah organisasi internasional. Hampir dalam semua kasus, tujuan sebuah perjanjian internasional adalah untuk membebaskan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara pesertanya.

Tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional adalah:

- 1) Perundingan (negotiation)
- 2) Penandatanganan (signature)
- 3) Ratifikasi (ratification)

b. Bentuk - bentuk perjanjian internasional adalah:

- 1) Traktat
- 2) Konvensi
- 3) Protokol
- 4) Persetujuan

Persetujuan (agreement) sifatnya kurang resmi dibanding traktat dan konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara. Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan - persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding ini juga hanya digunakan untuk persetujuan persetujuan yang sifatnya teknis dan administratif.

Pada umumnya agreement tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku sesudah dilakukan exchange of notes.

- 5) Arrangemen
- 6) Proses Verbal
- 7) Statuta
- 8) Deklarasi
- 9) Modus Vivendi

Modus Vivendi adalah suatu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat temporer atau provisional yang dimaksudkan untuk diganti dengan arrangement yang sifatnya lebih permanen dan terinci. Biasanya Modus Vivendi dibuat secara sangat tidak resmi dan memerlukan ratifikasi.

- 10) Pertukaran Nota atau Surat
- 11) Ketentuan Penutupan (Final Act)
- 12) Ketentuan Umum (Rudy, 2002:123-135).

2.4 Ekonomi Politik Internasional

Pada dekade 1970-an sejumlah pemikir Hubungan Internasional (HI) mulai memikirkan bagaimana negara - negara yang selalu didorong nafsu berperang, pada waktu yang sama tetap berkeinginan untuk tetap menjalin kerjasama dengan negara lain (Hermawan, 2005:5).

Para pemikir tersebut (yaitu, menginginkan negara-negara yang selalu didorong nafsu berperang untuk tetap melakukan kerja sama dengan negara lain), sebagaimana yang dijelaskan Hadiwinata, diantaranya adalah Kohane dan Nye, mencoba untuk menggambarkan bagaimana saling ketergantungan di bidang ekonomi telah mendorong negara-negara untuk tetap

menjalin kerja sama. Kemudian, Robert Gilpin mencoba mengidentifikasi keberadaan perusahaan multinational sebagai pelaku penting dalam mendorong negara-negara untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi. Melalui aktivitas perusahaan - perusahaan multinasional, modal, barang dan jasa dapat saling dipertukarkan melewati batasbatas negara dalam waktu relatif singkat sehingga dengan sendirinya meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. Sejak saat itu, menurut Hadiwinata ilmu ekonomi mulai mempengaruhi studi Hubungan Internasional (Hermawan, 2007:6).

Selama negara-negara di dunia menjadi saling bergantung dalam bidang satu sama lain, mereka membutuhkan peraturan untuk mengatur hubungan ekonomi internasional, yaitu perjanjian multilateral dan organisasi internasional (Rudy, 2005:75).

Menurut T May Rudy, organisasi ekonomi internasional adalah semua organisasi dari suatu dasar antarpemerintah yang berhubungan dalam hubungan ekonomi keuangan dan pembiayaan atau hal lain yang langsung mempunyai pengaruh pada hubungan tersebut (Rudy, 2005:76).

Konsep – konsep dan teori yang dipandang paling banyak diperbincangkan dalam ekonomi politik internasional pada bentang kontemporer yakni politik ekonomi, keterbelakangan, ketergantungan, saling ketergantungan, rejim internasional, pembangunan ekonomi, ekonomi kesejahteraan, dan teori ekonomi politik kontemporer lainnya.

Secara Umum Ekonomi-Politik Internasional merupakan studi yang memperelajari keerhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat

berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional (Perwita dan Yani, 2005:75). Sehingga secara empirik, tingkat saling ketergantungan dalam masyarakat internasional yang semakin tinggi sebagai akibat proses transnasionalisme dalam ekonomi yang melewati batas negara seperti peningkatan perdagangan, proses globalisasi dan terciptanya kelompok ekonomi regional telah menjadikan suatu kondisi dimana tidak ada lagi suatu kebijakan ekonomi politik nasional yang bersifat domestik. (Perwita dan Yani, 2005: 77)

Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (monodisiplin), artinya bahwa implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interdependensi, depedensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan power politics, realisme dan idealisme, linier dan strukturalis internasional, globalisasi, atau regionalisme, dan lain-lain (Ikbar, 2002:21).

Secara umum, akan dijelaskan pengertian ekonomi politik terlebih dahulu sebelum menjelaskan defenisi/pengertian ekonomi politik internasional itu sendiri. Lord Robbin menjelaskan bahwa: Ekonomi politik dapat mengandung dua versi. Pertama, ialah versi ekonomi klasik yang memberi pengertian ekonomi politik sebagai suatu kesatuan menyeluruh dari suatu pembahasan, sejak dari ilmu ekonomi (murni, teori) itu sendiri (economics science) samapi dengan teori-teori tentang kebijakan ekonomi (theory of economics policy) yang meliputi analisis dari bekerjanya keuangan negara. Kedua,

ekonomi politik versi modern yaitu ekonomi politik yang membahas bagaimana sistem ekonomi itu bekerja. Namun demikian, ia bukanlah scientific economics yang merupakan himpunan dari value free generalization tentang cara-cara sistem ekonomi itu bekerja. Ekonomi politik di sini membicarakan prinsip-prinsip umum dalam bidang ekonomi (Ikbar, 2002:17).

2.5 Perdagangan Internasional

Perdagangan antarnegara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi, mereka melakukan transaksi dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, dimana masing-masing negara tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk kebutuhannya sendiri). Ini terjadi karena setiap negara dengan negara mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dari perbedaan tersebut diatas, maka atas dasar kebutuhan akan barang lain yang saling menguntungkan sehingga terjadilah proses pertukaran yang dalam skala yang luas dikenal sebagai perdagangan internasional.

Adapun sebab – sebab umum yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya alam (natural resources)
2. Sumber daya modal (capital resources)
3. Tenaga kerja (human resources)
4. Teknologi.

Perdagangan internasional yang semakin meluas akan menimbulkan proses liberalisasi perdagangan kepada negara di sekitarnya. Proses ini menunjukkan suatu arah perekonomian yang bebas menurut paham liberalisme. Proses tersebut berimplikasi pada perekonomian suatu negara. Implikasi tersebut adalah :

1. Liberalisasi arus barang menuntut pengurangan hambatan tarif, bea, proteksi serta hambatan local content. Hambatan local content merupakan ketentuan hukum yang mewajibkan produk dalam negeri harus menggunakan komponen yang diproduksi dari dalam negeri.
2. Bertambahnya kapasitas produksi di seluruh dunia. Misalnya berkembangnya industrialisasi di berbagai lokasi di dunia dan berkembangnya perekonomian Negara Eropa Timur, India, China dan negara-negara Asia yang menjadi The Newly Industrializing Countries (NICs).
3. Kemajuanteknologidalam bentuk revolusi teknologi informasi mengatasi batasan mobilitas akibat batas-batas negara dan berupa penurunan biaya transaksi dan komunikasi. Peningkatan Investasi Langsung Asing/Foreign Direct Investment (FDI). Sejarah mencatat, negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, umumnya menutup kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber-sumber dari luar negeri. Dengan demikian tidak heran apabila, mengalir arus modal dari negara industri ke negara berkembang. Arus modal

ini dibagi menjadi dua, yakni arus modal yang tidak harus dibayar kembali dan yang harus dibayar kembali. Arus modal yang harus dibayar kembali diklasifikasikan menurut sumber arus modal tersebut, yakni dari sektor pemerintah dan sektor swasta negara maju kepada sektor yang sama di negara berkembang. Arus modal yang masuk dari sektor pemerintah sebagian besar berupa tabungan resmi yang bersifat konsesional dan sering disebut sebagai bantuan luar negeri, walaupun demikian karena sifatnya tetap harus dikembalikan umumnya disebut sebagai utang luar negeri. Sedangkan arus modal yang masuk dari sektor swasta dapat berupa investasi langsung baik dari individu maupun TNC (Transnational Corporations), investasi portofolio dan kredit ekspor (Kuncoro, 2003:247-248).

Penanaman investasi asing langsung merupakan bentuk yang berpengaruh bagi negara berkembang, karena biasanya disertai teknologi maju dan akses ke pasar internasional dalam satu paket. Sebagian besar investasi asing langsung dilaksanakan oleh TNC (Bahagijo, 2006: 29).

2.6 Bisnis Internasional

Bisnis Internasional merupakan suatu bidang kajian yang membahas tentang fenomena hubungan ekonomi internasional dimana negara dan aktor non-negara terlibat dalam sebuah kegiatan transaksi bisnis antar Negara (Sugeng, 2002:26).

Aspek penting dalam transaksi ekonomi atau bisnis antar bangsa adalah para pelaku bisnis yang membentuk

berbagai jaringan distribusi untuk mentransfer komoditi dari wilayah surplus produksi ke daerah-daerah minus produksi (Sugeng, 2002: 34).

Dalam kompetisi antar pelaku bisnis kontemporer pelaku utama bisnis internasional adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang (jasa dan komoditas) dan bahkan beroperasi melintasi batas-batas negara. Di dalam melakukan aktifitas bisnisnya, perusahaan pada umumnya mengemban dua macam misi: (1) penguasaan pangsa pasar bagi produk - produk yang dihasilkannya dan (2) mengemangkan aktifitas yang dapat memaksimalkan perolehan profit atau keuntungan. Penguasaan pangsa pasar merupakan cita-cita hampir setiap perusahaan yang pada dasarnya bersedia melakukan apa saja sejak pengenalan produk baru (Sugeng, 2002:36).

Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam memberikan sebuah penilaian tentang eksplanasi terhadap suatu pelaku bisnis internasional harus dilihat pada (1) unit analisisnya (individu, komunitas, organisasi, negara, asosiasi regional atau gabungan antara berbagai aktor. (2) tingkat analisisnya (mikro, mezzo atau makro yang juga identik dengan lokal, nasional atau internasional, (3) keterkaitan antara variabel- variabelnya (independen atau dependen) (4) regularitasnya, dengan melihat apakah ada suatu pola tertentu yang berulang, (5) dengan melihat apakah dapat melakukan suatu generalisasi terhadap suatu pola tertentu, serta (6) memprediksi konsekuensi- konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh suatu fenomena tertentu (Sugeng, 2002: 43).

Keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan bisnis internasional tidak lepas dari faktor

penguasaan pasar dalam menunjang produksi (Sugeng, 2002: 45).

2.7 Politik Luar Negeri

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, baik negara maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional. Maka, dalam melaksanakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut dalam suatu formula kebijakan yang dinamakan politik luar negeri. Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestic dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. (Perwita dan Yani, 2005:50).

2.8 Teori Investasi

Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (capital stock) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004).

Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut Sukirno (2002) adalah, "Merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat". Menurut Tambunan (2001) di dalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik (domestic fixed capital formation). Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestic bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2007), pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan, atau pembelian barang-barang modal baru (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun import, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik). Nopirin (2000) investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB. Selanjutnya Nopirin (2000), Faktor yang mempengaruhi investasi diantaranya adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan pemerintah, perkiraan tentang penjualan dan kebijaksanaan ekonomi. Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh besaran-besarnya pengeluaran agregat

yang wujud dalam perekonomian. Dan dalam perekonomian pengeluaran agregat itu sendiri dari empat jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi oleh perusahaan perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dari kenyataan itu dapatlah disimpulkan bahwa naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi adalah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan dari masing-masing atau gabungan factor faktor tersebut. Pada setiap moment, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi.

Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2006). Untuk keperluan statistik, istilah investasi asing kita gunakan definisi dari IMF Balance of Payment Manual (edisi ke empat), yang juga digunakan oleh Bank Indonesia. Definisi tersebut adalah: "investasi langsung mengacu pada investasi untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dalam kegiatan perusahaan dalam suatu perekonomian di luar tempat penanaman modal tersebut, sementara tujuan penanaman modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut". Istilah manfaat yang cukup lama tersebut merupakan investasi yang pengelolannya memerlukan sedikit pengawasan. pembatasan kuantitas juga mulai merambah pada pokok pikiran mengenai jasa keuangan, isu hukum persaingan usaha, International Property

Rights, hak buruh, perlindungan investasi dan perlindungan lingkungan. Penanaman modal asing lebih menjamin dalam kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan pinjaman luar negeri. Dengan adanya investasi asing, di Negara tersebut akan mendapat keuntungan dalam teknologi, transfer aset dan ketrampilan, transfer keahlian manajemen, dan resiko usaha relatif kecil dan lebih profitable. Perkembangan teknologi sudah dirasakan di Indonesia akibat dari sejumlah perusahaan asing, kebanyakan mereka perusahaan multinasional besar, yang sudah menanam modal di pasar Indonesia. Perusahaan ini sudah menyokong banyak dalam pengembangan sumber daya negeri, membangun infrastruktur, menetapkan fasilitas pabrik untuk mengekspor dan/atau menyediakan produk dan jasa untuk pasar yang domestik itu.

3. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variable yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan The United State Indonesia Society (USINDO) yang menjembatani kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat ataupun Pemerintah Amerika dan diimplementasikan dengan teori - teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kerjasama investasi Amerika Serikat – Indonesia sebelum Perjanjian Comprehensive Partnership

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Arus investasi langsung ke negara-negara Asia telah meningkat pesat sejak awal tahun 1990an. Meskipun sempat menurun ketika terjadi krisis Asia, aliran masuk FDI ke negara – negara tersebut telah kembali meningkat pesat paska krisis. Namun demikian, kenaikan aliran modal masuk di dalam bentuk FDI ke Indonesia masih relatif terbatas. Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relative tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, aliran masuk FDI sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang sustainable di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui perkembangan FDI di Indonesia agar kebijakan untuk mendorong peningkatan aliran FDI dapat lebih efektif diarahkan pada faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal dalam bentuk FDI di Indonesia. Pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (pull factors) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (push factors). Pull factors dari masuknya FDI antara lain terdiri dari kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan liberalisasi FDI (di dalam bentuk insentif investasi). Sedangkan yang termasuk pull factors antara lain strategi investasi maupun strategi

produksi dari penanam modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima.

Aliran FDI dunia mengalami peningkatan sejak tahun 1990-an dengan puncaknya terjadi di tahun 2000, hal ini terutama didorong oleh arus FDI ke negara berkembang yang dilakukan oleh negara-negara donor seperti Amerika Serikat. Di bidang investasi, pada tahun 2010 realisasi investasi AS di Indonesia mencapai US\$ 930,8 juta, meningkat 542,7% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah US\$ 171,5 juta. Dengan jumlah tersebut, AS merupakan investor terbesar ke-tiga di Indonesia setelah Singapura dan Inggris. Untuk periode Januari – Maret 2011, nilai investasi AS di Indonesia mencapai 359,1 juta USD atau urutan kedua terbesar setelah Singapura. Untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi RI-AS, terdapat forum "Trade Investment Council" (TIC) tingkat Menteri guna membahas dan menyelesaikan berbagai isu perdagangan dan investasi kedua negara. TIC terdiri dari empat Working Group, yaitu WG on Industrial and Agricultural Products, WG on Illegal Logging and Associated Trade, WG on Intellectual Property Rights, dan WG on Investment. Sementara itu dalam rangka menjamin investasi AS di Indonesia, pada tanggal 14 April 2010 di Washington, D.C. telah ditandatangani persetujuan Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation (ISA- OPIC) RI – AS oleh Kepala BKPM dan Acting President OPIC. Perjanjian ISA- OPIC ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 48 tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan diharapkan dapat meningkatkan minat investor AS menanamkan modal di Indonesia (<http://www.deplu.go.id/Lists/BilateralCooperation/DispForm.aspx?ID=11> Diakses 20/07/2013).

Pemerintah Amerika Serikat berharap volume perdagangan dengan Indonesia akan meningkat dua kali lipat dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapai tujuan itu, interaksi yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat serta perusahaan di kedua negara harus ditingkatkan. Selain itu, lalu lintas pertukaran barang sepatutnya tidak mendapatkan hambatan.

Lingkungan bisnis di Indonesia merupakan suatu peluang yang bagus untuk investasi langsung. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sering merasa sulit dan memakan waktu yang lama untuk memasuki pasar Indonesia. Dengan keadaan yang semakin membaik untuk masuk ke pasar Indonesia dan berbagai masalah aturan hukum dan kebijakan-kebijakan ekonomi dapat disepakati oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Hasil dan pembahasan menguraikan temuan lapangan (jika riset) dan analisis pembahasannya.

4.2 Program - program yang dilakukan Indonesia – Amerika Serikat dalam meningkatkan kerjasama investasi di Indonesia

Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat dibutuhkan bagi suatu Negara dalam menggerakkan mesin ekonomi mengawal pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi

Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal, bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

Tujuh belas perusahaan UKM (usaha kecil dan menengah) dari AS mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari misi dagang “Trade Winds Asia”. Misi yang melibatkan kunjungan ke lima negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ini bertujuan untuk memperluas kesempatan bisnis bagi perusahaan-perusahaan AS di kawasan tersebut. Wakil Duta Besar Amerika Serikat Ted Osius ikut menyambut para perwakilan dari ke-17 perusahaan di Jakarta. Dalam misinya di Indonesia, para peserta Trade Winds Asia bertemu dengan anggota-anggota Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Kamar Dagang Amerika di Indonesia dan berbagai mitra bisnis potensial. Misi ini juga berusaha mendukung perkembangan ekonomi dan lapangan kerja di kedua negara. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam misi ini berasal dari berbagai sektor seperti arsitektur, pembangkitan tenaga, industri bahan bangunan, pertambangan, transportasi, teknologi informasi dan manufaktur.

Kemudahan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia– negara ke-empat terbesar penduduknya di dunia – lewat dukungan Overseas Private Investment Corporation (OPIC) hari ini telah semakin ditingkatkan dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian oleh kedua negara.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Perjanjian Comprehensive Partnership Indonesia – Amerika merupakan kerjasama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral kedua negara yang merupakan komitmen jangka panjang terutama dalam sektor ekonomi.

Dalam perjanjian ini Indonesia dan Amerika Serikat lebih mengedepankan kerjasama perekonomian khususnya dalam investasi. Karena investasi merupakan sarana terhadap pembangunan dan perkembangan suatu negara. Investasi yang dilakukan Amerika dan Indonesia lebih berpusat kepada pembangunan infrastruktur negara Indonesia. Karena buruknya infrastrukturnya di Indonesia dapat menjadi suatu hambatan dalam melakukan investasi di Indonesia dan mengurangi daya tarik para investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sering merasa sulit dan memakan waktu yang lama untuk memasuki pasar Indonesia. Dengan keadaan yang semakin membaik untuk masuk ke pasar Indonesia dan berbagai masalah aturan hukum dan kebijakan-kebijakan ekonomi dapat disepakati oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan adanya pembangunan di sektor infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Ketersediaan infrastruktur mencerminkan adanya investasi dan

investasi yang merata mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi. Dalam meningkatkan kerjasama investasi sesuai yang ada dalam Perjanjian Comprehensive Partnership, Amerika merangkul perusahaan-perusahaan Amerika untuk melihat Indonesia yang merupakan salah satu tujuan negara untuk berinvestasi. Dengan membentuk badan-badan kerjasama Amerika dan Indonesia menambah luas yang mendukung dari pencapaian Perjanjian Comprehensive Partnership.

5.2 Rekomendasi

Dalam bagian akhir ini, peneliti mengajukan saran terhadap permasalahan yang ada untuk dapat dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut.

1. Permasalahan dalam penelitian ini memungkinkan untuk dibahas dalam konteks kerjasama investasi dengan mengkaji tentang Perjanjian bilateral
2. Permasalahan ini juga bisa diteliti menggunakan pendekatan kerjasama dalam mengatasi permasalahan global
3. Dalam hal kerjasama investasi dapat ditelaah dari sudut pertumbuhan perekonomian suatu negara kawasan memungkinkan mempengaruhi kondisi perekonomian Internasional.
4. Penelitian berikutnya diharapkan mampu membahas tentang Kerjasama Investasi dalam pembangunan suatu negara.
5. Penelitian selanjutnya, diharapkan mampu meninjau kembali tentang

kesiapan suatu negara dalam melakukan kerjasama dalam pembangunan perekonomian suatu negara.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Amir, Muhidin S. 2000. Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. Jakarta:PPM.

Bahagijo, Sugeng. 2006. Globalisasi Menghempas Indonesia. Jakarta: LP3ES Halwani, R.

Hendra. 2005. Ekonomi internasional dan globalisasi ekonomi. Bogor: Ghalia Indonesia

Hermawan, Yulius P. 2007. Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu

Holsti, K. J. 1995. Politik Internasional. Bandung: PT. Bina Cipta

Holsti, K.J.,. 2000. International Politics: A Framework Analysis 7th International Edition. Singapore: Prentice-Hall International.

Ikbar, Yanuar. 2002. Ekonomi Politik Internasional, Sebuah Pengantar. Yogyakarta : Graha Ilmu

Jackson Robert dan George Sorensen. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta:Pusaka Pelajar

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Rudy, Teuku May 2002. Studi Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: PT.Refika Aditama

_____. 2005. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung. PT.Refika Aditama

Sugeng, Bob Hadiwinata, 2002. Politik Bisnis Internasional. Jakarta: Kanisius Sugiono, Muhadi.

2006. Global Governance Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta:Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Acuan artikel dalam buku publikasi:

Kementerian Perdagangan 2012
Kementerian Koordinator Perekonomian : 2011

Badan Pusat Statistik 2012
Kementerian Koordinator Perekonomian 2011

Acuan artikel dalam Jurnal:

Claudya. 2009. Kerjasama Perdagangan Bilateral. Economic World melalui http://buahpikir-claudya-fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36739economic%20world.html [16/04/13].

Decy Arifinsjah. 2012. Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia – Amerika Serikat di Bidang Ekinomi dan Keuangan melalui http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2013%5Ckajian%5Cpkrb%5CKajian_Kerja_Sma_Bilatera1_RI-AS.pdf [20/6/2013]

Acuan artikel dalam situs:

U.S Companies Export. 2012. Doing Business in Indonesia melalui http://export.gov/indonesia/doingbu_sinnessinindonesia/index.asp [15/05/2013]

USINDO. 2012. Kemitraan

Komprehensif melalui
<http://www.usindo.org/id/country-info/comprehensive-partnership/>
[15/05/2013]

Department US
of
State
2011

Indonesia Trade and Investment
Relationship melalui
http://indonesia.usaid.gov/documents/document/Document/648/USIndonesia_Trade_and_Investment_Relationship [16/05/2013]

UNCTAD. FDI Statistics Division on
Investment and Enterprise melalui
<http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics.aspx>

[15/05/2013] BPS. 2013.

Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia melalui
www.bps.go.id/brs_file/pdb_05feb_13.pdf [15/05/2013] Jarak
Online. 2012. Mou Indonesia
Amerika Pembangunan
Infrastruktur melalui
<http://www.jarakonline.com/detail-2872-mou-indonesiaamerika-pembangunan-infrastruktur.html>
[11/05/2013]

Kementrian Energi dan Sumber Daya
Mineral. 2012. Chevron Terapkan
EOR Surfaktan Terbesar di Dunia
di Lapangan Minas melalui
(<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5994-chevron-terapkan-eor-surfaktan-terbesar-di-dunia-di-lapangan-minas.html>)
[11/05/2013]